



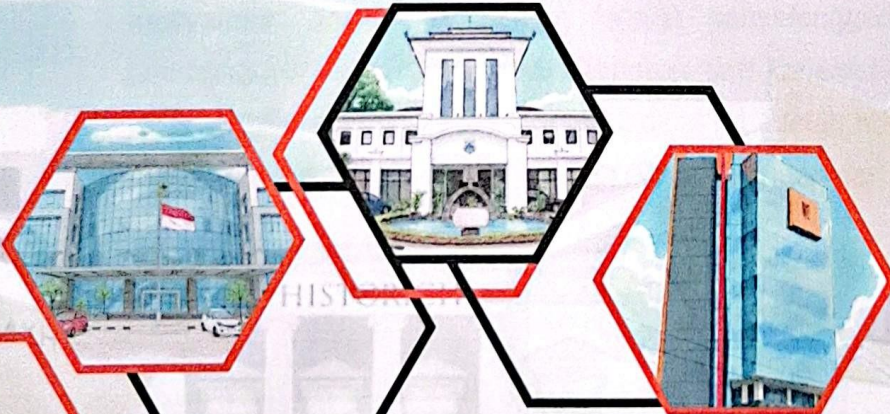
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA CIMAHI



Letkol (Purn) NGATIYANA, S.A.P.
WALI KOTA CIMAHI



ADHITIA YUDISTHIRA, S.E., A.K., CA
WAKIL WALI KOTA CIMAHI



2025

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2025 dapat selesai tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Tahun 2025, merupakan periode masa transisi perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam LKIP Kota Cimahi Tahun 2025 didasarkan pada target-target strategis berdasar pada dokumen RKPD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2025 dan selaras dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tetap relevan dalam mewujudkan Visi "Cimahi Mantap" yakni Maju, Agamis, Nyaman, Aman, Teladan dan Produktif. Melalui kolaborasi antar generasi yang maju, unggul dan berkelanjutan, yang mencerminkan upaya untuk berkembang sebagai kota yang bertransformasi menjadi modern dan kompetitif, tetapi tetap mempertahankan kearifan lokal, juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara teknologi inovasi, ekonomi kreatif, nilai-nilai agamis, dan budaya serta keberagaman dalam pembangunan Kota Cimahi.

Sejalan tekad kami untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, maka pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Cimahi tidak terlepas dari kerjasama semua pihak. Capaian yang terdokumentasi dalam laporan kinerja ini adalah hasil sinergi dan kolaborasi dari seluruh jajaran perangkat daerah serta dukungan dari masyarakat Kota Cimahi.



Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2025 ini bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan refleksi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Cimahi, April 2026

WALI KOTA CIMAHI,



LETKOL (PURN) NGATIYANA, S.A.P.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	1
PENDAHULUAN.....	4
LATAR BELAKANG.....	4
DASAR HUKUM.....	4
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKIP KOTA CIMAHI.	6
ISU STRATEGIS.....	7-13
RENSTRA KOTA CIMAHI.....	13-16
PERENCANAAN KINERJA	17-26
PERENCANAAN KINERJA	
1. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA	17-20
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (berdasar RKPD Perubahan)	18
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (berdasar RJMD 2025-2029)	19-20
SANDINGAN IKU KOTA CIMAHI BERDASAR RKPD PERUBAHAN DAN RPJMD BARU	22-26
AKUNTABILITAS KINERJA	27
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET KINERJA.....	27-210
EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN.....	201-210
PENUTUP	
KESIMPULAN UMUM.....	211
EVALUASI DAN PERBAIKAN.....	212
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
PRESTASI DAN PENGHARGAAN	213-217

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban kinerja yang harus disampaikan kepada masyarakat secara transparan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat secara administratif dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014, pengertian laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2025 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan atau sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan kinerja ke depan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2025 memuat laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam periode satu tahun anggaran. LKIP 2025 merupakan pelaporan pertama dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi tahun 2025-2029 dengan visi **“CIMAHI MANTAP”**.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Perubahan Tahun 2025 ditetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis, 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada 5 (lima) misi dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029 yang dijelaskan sebagai berikut:

- Misi pertama “Mewujudkan Kota Cimahi yang Maju dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Agamis dan Berkarakter” yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU);

- Misi kedua "Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Produktif" terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Misi ketiga "Menjadikan Cimahi sebagai Kota Teladan dalam Tata Kelola Pemerintahan" terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Misi keempat "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondusifitas Kota yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan" yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Misi kelima "Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kolaborasi Antar Generasi" terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU);

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pada tahun anggaran 2025 yang merupakan masa transisi perencanaan, penyusunan LKIP Kota Cimahi tahun 2025 mengacu pada IKU yang terdapat pada dokumen RKPD Perubahan dan Dokumen RPJMD 2025-2029. Pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Cimahi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi, serta penyerapan anggaran pada Perjanjian Kinerja Kota Cimahi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Jumlah total IKU yang terdapat pada dokumen RKPD Perubahan Kota Cimahi tahun 2025 adalah 12 (dua belas) IKU, dengan capaian IKU yang mencapai 100% sebanyak 3 (tiga) IKU yaitu Tingkat partisipasi masyarakat, Opini BPK, Indeks *Liveable City* aspek tata ruang, lingkungan hidup dan infrastruktur. Sedangkan IKU yang capaiannya melampaui target 100% terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu Indeks Kesehatan 102,18%, Indeks pengetahuan 100,65%, Indeks Risiko Bencana 145,13. Sedangkan 1 (satu) IKU yang capaiannya tidak mencapai 100% yaitu Indeks Pemberdayaan Gender dengan capaian 99%. Pada dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025 terdapat 5 (lima) IKU yang dilanjutkan pada dokumen RPJMD baru yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Gini, LPE, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan
- IKU pada dokumen RPJMD 2025-2029 terdapat 14 (empat belas) IKU dengan capaian sebagai berikut:

- Dari 14 (empat belas) IKU, terdapat 5 (IKU) yang merupakan IKU lanjutan dari dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian 103,88%, Indeks Gini 103,69%, LPE 101,33%, Tingkat Pengangguran Terbuka 102,51%, Tingkat Kemiskinan 101,90%
- Hasil rekapitulasi capaian IKU sebagai berikut terdapat 10 (sepuluh) IKU yang mencapai lebih dari 100% yaitu Indeks Pembangunan Manusia 100,6%, Usia Harapan Hidup 100,52%, Indeks Reformasi Birokrasi 103,88%, Nilai Reformasi Birokrasi General 111,37%, PDRB Per-kapita 105%, LPE 101,33%, TPT 102,51%, Indeks Gini 103,69%, Tingkat Kemiskinan 101,90%.
- Terdapat 3 (tiga) IKU yang mencapai 100% yaitu Indeks Perkotaan Berkelanjutan, Harapan Lama Sekolah, Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- Terdapat 1 (satu) IKU yang capaiannya kurang dari 100% yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial 96,88%.
- Anggaran belanja langsung yang dianggarkan pada APBD Kota Cimahi tahun anggaran 2025 sebesar **Rp.1.762.365.524.440,94,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.1.662.426.274.003,-** dengan capaian kinerja **94,33%**, dengan efisiensi anggaran sebesar **Rp. 99.939.250.437,94,-** atau sebesar **5,67%**.

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

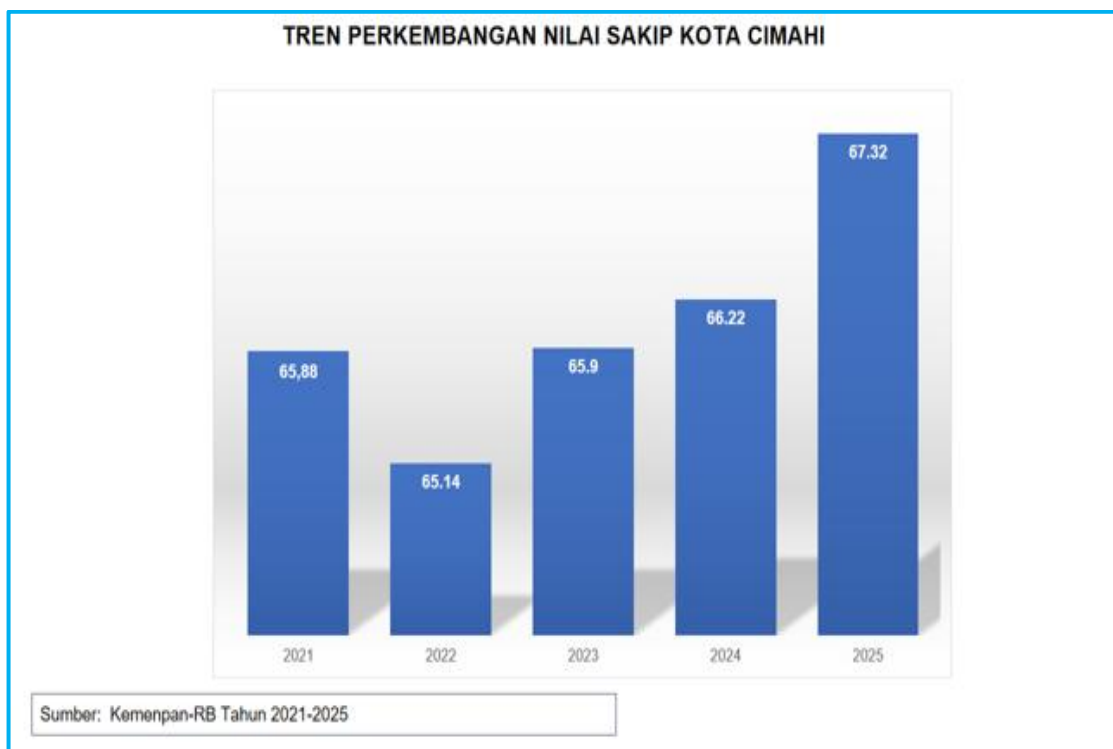
Pelaksanaan SAKIP, didasarkan pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain itu, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pasal 5 penyelenggaraan SAKIP meliputi: perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Pemerintah Daerah Kota Cimahi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen LKIP Kota Cimahi Tahun 2025 mengacu pada dokumen:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2025-2029, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2025, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
2. RKPD Perubahan Tahun 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025;

3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 berdasar Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029;
4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 berdasar Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029;
5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 berdasar RKPD Perubahan Tahun 2025;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBDP Tahun 2025.



Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Kemenpan dan RB menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi pada Tahun 2021 memperoleh nilai **65,88** atau predikat B dan mengalami penurunan **0,74** poin dan pada Tahun 2022 memperoleh nilai **65,14**, tahun 2023 kota Cimahi memperoleh nilai **65,90** dengan predikat B dan mengalami kenaikan poin sebesar **0,76** poin, pada tahun 2024 kota Cimahi memperoleh nilai **66,22** dengan predikat “B” dan mengalami kenaikan poin **0,32**. Tahun 2025 nilai SAKIP Kota Cimahi mengalami kenaikan nilai sebanyak **1,1** poin.

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang baik

pada sebagian unit kerja. Dari catatan hasil evaluasi SAKIP oleh Kemenpan dan RB Tahun 2025 telah ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen LKIP Tahun 2025 ini.

2. DASAR HUKUM

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2025, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKIP KOTA CIMAHI

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kota Cimahi yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029 dan pada Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah

dipercayakan kepada Pemerintah Kota Cimahi serta sebagai alat atau sarana atau bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja ke depan.

4. ISU STRATEGIS

4.1. Isu Strategis pada dokumen RPKD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2025

Isu Strategis pada RPKD Perubahan, merupakan bagian dari upaya akselerasi pencapaian visi dan misi Pembangunan daerah sebagaimana terdapat pada RPJMD Kota Cimahi tahun 2025-2029 dengan pendekatan berbasis hasil evaluasi kinerja Pembangunan tahun sebelumnya. Isu strategis yang terdapat pada RPKD Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia

Penguatan daya saing SDM menjadi prioritas strategis dikarenakan hasil evaluasi kinerja Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2024 menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berhasil melampaui target. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas dan pemerataan jika dilihat dari indikator rata-rata lama sekolah yang masih stagnan dan ketimpangan akses pendidikan antar kelompok sosial. Selain itu tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan namun masih dihadapi alam bentuk *mismatch* antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja, terbatasnya inovasi dalam pendidikan vokasional dan pelatihan berbasis teknologi, serta keterbatasan ruang ekspresi ekonomi bagi generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing SDM belum terbentuk secara merata dan berkelanjutan.

2. Peningkatan Tingkat Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang Aman, Bergizi dan Berkelanjutan

Evaluasi hasil pembangunan tahun 2024 menunjukkan terdapat peningkatan pada beberapa indikator kinerja urusan pangan, namun tantangan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang merata masih menjadi persoalan krusial di Kota Cimahi. Sebagai wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan pertanian, Kota Cimahi sangat bergantung pada distribusi pasokan pangan dari luar daerah. Ketergantungan ini meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga, keterlambatan distribusi, dan risiko gangguan pasokan akibat dinamika regional maupun global. Ketergantungan ini meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi

harga, keterlambatan distribusi, dan risiko gangguan pasokan akibat dinamika regional maupun global yang akan berdampak pada tingkat keterjangkauan pangan oleh rumah tangga miskin dan rentan, terutama pada komoditas strategis seperti beras, protein hewani, dan sayuran segar.

3. Percepatan Transformasi Ekonomi Daerah melalui Penguatan Sektor Unggulan dan Revitalisasi Pelaku Usaha Lokal

Kota Cimahi memiliki potensi ekonomi kreatif, digital dan kewirausahaan berbasis komunitas yang belum dimanfaatkan secara optimal yang bisa dijadikan kekuatan ekonomi baru yang adaptif terhadap perubahan zaman. Industri pengolahan dan perdagangan masih menjadi penopang utama perekonomian kota Cimahi. Kinerja UMKM masih menghadapi kendala yaitu terbatasnya akses terhadap pembiayaan, lemahnya manajemen usaha, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta keterbatasan akses pasar. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas pelaku usaha lokal, dan berkontribusi terhadap tingginya ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi daerah menjadi isu strategis yang memerlukan kebijakan afirmatif, fasilitasi kemitraan multipihak, serta peningkatan kapabilitas ekonomi masyarakat.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Evaluasi capaian indikator makro Kota Cimahi Tahun 2024 menunjukkan bahwa TPT mengalami penurunan dan telah melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan adanya pemulihan aktivitas ekonomi pasca-pandemi. Namun, masih terdapat banyak tantangan utama yang harus dihadapi seperti masih tingginya pengangguran usia muda yang belum bisa terserap secara optimal ke dalam dunia kerja formal ataupun sektor wirausaha. Perkembangan ekonomi digital dan transformasi industri seharusnya dapat menjadi peluang bagi penyerapan tenaga kerja baru. Namun, tantangan transformasi digital yang belum merata dan keterbatasan literasi teknologi menyebabkan banyak kelompok usia produktif tertinggal dalam kompetisi pasar kerja baru. Di sisi lain, pelaku usaha kecil dan menengah yang seharusnya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar masih terkendala skala usaha dan daya saing. Oleh karena itu, isu pengangguran terbuka perlu ditangani secara sistemik melalui kebijakan peningkatan

kualitas dan daya saing tenaga kerja, penguatan sistem pelatihan dan sertifikasi kompetensi, fasilitasi kewirausahaan produktif, serta penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendorong perluasan lapangan kerja formal dan berkelanjutan.

5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Penguatan tata kelola pemerintahan masih menjadi isu strategis yang diprioritaskan dalam Pembangunan Kota Cimahi ke depan. Reformasi birokrasi perlu penguatan pada penciptaan birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil, disertai dengan peningkatan kapabilitas digital, penguatan sistem merit, dan pembentukan budaya kerja kolaboratif. Selain itu, perluasan partisipasi publik, transparansi kebijakan, dan pengawasan berbasis masyarakat juga menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warga kota.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Masalah pengelolaan sampah masih menjadi isu mendasar di Kota Cimahi. Tingkat timbulan sampah per-kapita terus meningkat, sementara kapasitas pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan masih terbatas. Program pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber belum sepenuhnya efektif, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah. Di sisi lain, Kota Cimahi juga menghadapi tekanan dari dampak perubahan iklim, seperti peningkatan suhu rata-rata, curah hujan ekstrem, dan risiko banjir lokal yang semakin tinggi. Hal ini belum didukung oleh infrastruktur resapan air dan rendahnya ketahanan ekosistem terhadap tekanan ekologis. Dengan demikian, peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi isu strategis yang harus ditangani secara lintas sektor dan lintas skala.

7. Penguatan Kondusifitas Kota untuk mewujudkan Lingkungan Aman, Tertib dan Nyaman

Kota Cimahi masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga stabilitas sosial, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan. Berbagai indikator Ketenteraman dan Ketertiban Umum (trantibum) menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan penanganan terhadap potensi gangguan

keamanan, namun frekuensi kasus pelanggaran perda, konflik sosial, dan gangguan ketertiban di ruang publik masih memerlukan penanganan yang lebih komprehensif.

8. Optimalisasi Aksesibilitas dan Efektivitas Layanan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan Daerah

Isu perlindungan kelompok rentan masih menjadi tantangan yang signifikan dan membutuhkan penanganan. meskipun telah terdapat program-program yang mendukung perlindungan perempuan dan anak, seperti layanan perlindungan terpadu dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dan pencegahan kekerasan berbasis *gender*. Selain itu, partisipasi perempuan dalam sektor publik dan ekonomi masih harus ditingkatkan. Kelompok disabilitas dan lansia juga masih menghadapi hambatan dalam mengakses pelayanan dasar dan fasilitas publik. Dengan demikian, perlindungan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan harus menjadi prioritas strategis dalam pembangunan Kota Cimahi.

9. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Pendapatan Secara Berkelanjutan

Angka kemiskinan di kota Cimahi cenderung mengalami penurunan dan mencapai target yang telah ditetapkan, namun dalam hal pemerataan kesejahteraan masih menjadi isu strategis yang harus diatasi. Pada tahun 2024, Indeks Gini kota Cimahi yang merupakan indikator yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran atau pendapatan, pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian. Peningkatan ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pengeluaran dan pendapatan antar kelompok Masyarakat yang mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan.

4.2. Isu Strategis pada RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029

Isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan isu KLHS (kajian lingkungan hidup strategis) RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029 dan isu lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selain itu, isu strategis dirumuskan berdasarkan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk

mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan isu strategis RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Meskipun IPM Kota Cimahi berada di atas rata-rata Jawa Barat yaitu dengan capaian 80,30 pada tahun 2024, namun masih terdapat permasalahan yaitu belum optimalnya daya saing SDM yang dipicu dengan adanya kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Jika merujuk pada isu KLHS, yakni belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan akses pendidikan maka perlu adanya penguatan akses pada layanan dasar pendidikan dan kesehatan di tengah isu Nasional yaitu adanya momentum bonus demografi Indonesia;

2. Tingkat Ketersediaan dan Konsumsi Pangan

Kota Cimahi masih menghadapi tantangan pada rendahnya tingkat ketersediaan dan konsumsi pangan. Isu ini diperkuat dengan adanya dampak dari isu global yaitu adanya perubahan iklim, sehingga menuntut kebijakan penguatan ketersediaan dan pemanfaatan pangan yang lebih efektif bagi masyarakat.

3. Pengembangan Sektor Ekonomi Daerah

Kota Cimahi dalam 5 (lima) tahun terakhir, perekonomiannya ditopang oleh 75% kontribusi utama, dari sektor industri pengolahan 40%, sektor primer berkontribusi 0,18% dan sektor tersier sebesar 24,12%. Namun di kota Cimahi terdapat permasalahan yaitu masih kurangnya pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi daerah dan belum tergalinya penyediaan lapangan kerja melalui ekonomi kreatif digital serta pariwisata.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di kota Cimahi masih berada pada kategori tinggi. Jika merujuk pada isu KLHS hal ini dikarenakan belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja melalui ekonomi kreatif dan digital serta pariwisata.

5. Tata Kelola Pemerintahan

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi kota Cimahi pada tahun 2019-2024 sudah menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Nilai Indeks

Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 dengan capaian 86,29 dengan predikat A-. Namun untuk capaian nilai SAKIP kota Cimahi pada tahun 2024 yaitu 66,22 dengan predikat B. Untuk capaian nilai SAKIP Kota Cimahi tahun 2024 belum naik predikat ke BB dikarenakan masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi dari Kemenpan-RB yang masih harus ditindaklanjuti dan disempurnakan, baik itu dari kategori perencanaan, pengukuran, pelaporan maupun evaluasi.

6. Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH kota Cimahi tahun 2022 yaitu 48 pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 44,65, sedangkan pada tahun 2024 kembali meningkat yaitu 40,99. Isu IKLH menurut isu KLHS yaitu belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup yang efisien, menurunnya daya dukung air, daya dukung pangan, ketersediaan lahan, kualitas udara dan keanekaragaman hayati. Serta belum optimalnya upaya mitigasi bencana dan perubahan iklim diantaranya penurunan gas rumah kaca.

7. Kondusifitas Kota

Menurut data isu KLHS, permasalahan kondusifitas kota Cimahi yaitu belum optimalnya pengendalian pembangunan perkotaan, kemacetan dan pemerataan infrastruktur serta akses terhadap perumahan layak dan aman.

8. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Kelompok Rentan Lainnya

Capaian IPM Kota Cimahi pada tahun 2024 yaitu 80,08 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Jawa Barat yaitu 74,43. Namun, jika merujuk pada RPJMD 2025-2029, di kota Cimahi masih terdapat beberapa permasalahan yaitu diantaranya belum terpadunya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan

9. Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

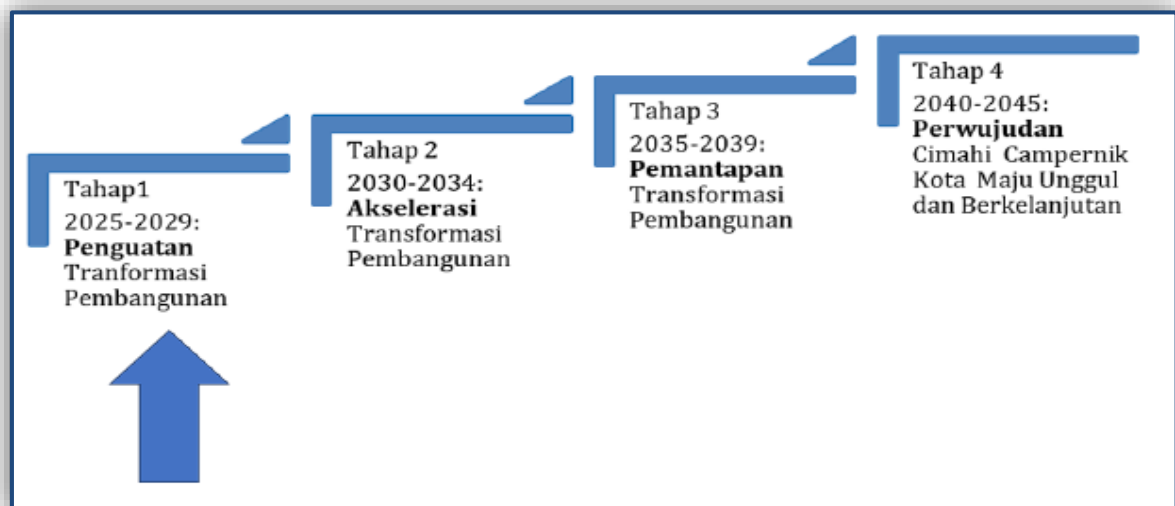
Angka kemiskinan di kota Cimahi menunjukkan penurunan di tahun 2024 yaitu dengan capaian 4,39%. Namun, jumlah jiwa yang masih berada di garis kemiskinan masih signifikan mengingat kepadatan penduduk Cimahi yang sangat tinggi. Angka gini ratio yang berada pada level 0,402 pada tahun 2024

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kota Cimahi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata.

5. RENSTRA KOTA CIMAHI

1. VISI DAN MISI KOTA CIMAHI

Pembangunan periode 2025-2029 merupakan tahap pertama dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045. Fokus utamanya adalah “Penguatan Transformasi Pembangunan” yang bertujuan untuk melanjutkan capaian pembangunan, menjaga kesinambungan pencapaian target pembangunan jangka panjang, serta meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal dalam rangka penguatan transformasi pembangunan daerah.



5.1. Tahapan Pembangunan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029

Sumber: Bapperida Kota Cimahi

Visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2025-2029 adalah:

“CIMAHI MANTAP”

MELALUI KOLABORASI ANTAR GENERASI YANG MAJU, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN

yang mencerminkan upaya untuk berkembang sebagai kota yang bertransformasi menjadi modern dan kompetitif, tetapi tetap mempertahankan kearifan lokal, juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara teknologi inovasi, ekonomi kreatif, nilai-nilai agamis, dan budaya serta keberagaman dalam pembangunan Kota Cimahi.

Adapun visi Kota Cimahi 2025-2029 tersebut dijabarkan sebagai berikut:

“CIMAHI MANTAP”

Maju	{	Mewujudkan Pembangunan Kota Cimahi yang lebih maju di segala bidang
Agamis	{	Menciptakan kota yang agamis serta menjunjung tinggi nilai religius dan toleran
Nyaman	{	Mewujudkan lingkungan asri dan berkelanjutan dengan fasilitas ruang ekspresi publik yang lebih representatif
Teladan	{	Menjadikan Cimahi sebagai kota teladan dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas
Aman	{	Mewujudkan lingkungan masyarakat yang damai, tertib dan teratur
Produktif	{	Meningkatkan daya kreativitas masyarakat yang produktif menuju masyarakat sejahtera

Dengan demikian, visi **CIMAHI MANTAP** adalah mewujudkan kota yang bertransformasi menjadi modern dan kompetitif, tetapi tetap mempertahankan identitas budaya yang kuat. Perumusannya mempertimbangkan tantangan dan peluang pembangunan, serta arah kebijakan Nasional dan Provinsi. Visi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi, ekonomi kreatif, teknologi, dan nilai-nilai agamis serta budaya dalam pembangunan Kota Cimahi.

Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi Tahun 2025-2029, akan dicapai melalui 5 (lima) misi teknokratis, sebagai berikut:



Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD kota Cimahi Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Cimahi Tahun
2025-2029**

VISI	MISI TEKNOKRATIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
CIMAHI MANTAP	1. Mewujudkan Kota Cimahi yang Maju dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Agamis dan Berkarakter	1.1. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia		IPM	80,37	80,64	80,94	81,28	81,65	82,7
			1.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	UHH	75,61	75,79	75,96	76,13	76,31	76,48
			1.1.2. Meningkatnya kualitas individu yang berpengetahuan dan berkarakter	HLS	13,87	13,92	13,97	14,02	14,07	14,12
	2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang Produktif	2.1. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi		PDRB Per kapita	73,31 - 73,67	79,68-80,65	78,96-80,71	81,49-84,29	83,88-88,03	86,13-92,34
			2.1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	LPE	5,19-5,60	5,72-6,22	5,86-6,36	6-6,5	6,15-6,65	6,75-7,25
			2.1.2. Menurunnya tingkat pengangguran	TPT	8,97	8,69-9,49	8,67-9,48	8,63-9,43	8,6-9,41	8,55-9,35
	3. Menjadikan Cimahi sebagai Kota Teladan dalam Tata Kelola Pemerintahan	3.1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	86,29	86,79	87,25	87,78	88,3	88,8
			3.1.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi General	76,32	76,51	77,01	77,51	78,01	78,11
	4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kondusifitas kota yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan	4.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kondusifitas kota		Indeks Perkotaan Berkelanjutan	70	70,1	70,2	70,3	70,4	70,5
			4.1.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	50,35	50,60	50,85	51,10	51,36	51,61
VISI	MISI TEKNOKRATIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
			4.1.2. Meningkatnya stabilitas wilayah	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	50,01	50,01	50,26	50,51	50,76	51,01
	5. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat melalui Kolaborasi Antar Generasi	5.1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Indeks GINI	0,379-0,386	0,369-0,392	0,369-0,392	0,368-0,391	0,367-0,39	0,367-0,39
			5.1.1. Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	0,57	0,58	0,59	0,6	0,61	0,62
				Tingkat Kemiskinan	3,87 - 4,28	3,79-4,12	3,62-3,95	3,46-3,79	3,28-3,61	3-3,32

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2025, pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Cimahi pada dasarnya masih mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 sebagai pedoman pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi, seiring dengan telah dilantiknya Kepala Daerah terpilih pada awal tahun 2025, terdapat penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui penyusunan rancangan akhir RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang baru. Oleh karena itu, pada penyusunan Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian dengan rancangan akhir RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029, agar arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dapat terintegrasi dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Namun, pelaksanaan pembangunan daerah tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menggunakan indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen RKPD Kota Cimahi Tahun 2025. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah pada tahun 2025 sebagai tahun transisi perencanaan, sekaligus mempersiapkan integrasi secara bertahap dengan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029 sebagai pedoman pembangunan jangka menengah ke depan.

Untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas pelaporan, maka Perjanjian Kinerja dalam LKIP Kota Cimahi tahun 2025 berdasarkan pada dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025 dan RPJMD 2025-2029. Penyesuaian ini dimaksudkan agar pelaporan kinerja tetap relevan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang baru, sekaligus memenuhi akuntabilitas terhadap perubahan target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Kota Cimahi Perubahan 2025
 (Berdasarkan RKPD Perubahan Tahun 2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
MISI 1 : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul			
1	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Kesehatan	84,31
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,35
		Indeks Pengetahuan	76,5
2	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	100%
MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	81,26 (A-)
		Opini BPK	WTP
MISI 3 : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah			
4	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Indeks Gini	0,379-0,386
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,19-5,60
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,05-9,86%
MISI 4 : Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan			
5	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	3,87-4,28%
MISI 5 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan			
6	Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan	Indeks <i>Liveable City</i> Aspek Tata Ruang,	Sedang (70)

		Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	
7	Meningkatkan Ketahanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Sedang (72,63)

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Kota Cimahi Perubahan 2025
 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029)

NO.	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Misi I: Mewujudkan Kota Cimahi yang Maju dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Agamis dan Berkarakter				
1	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	80,37
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,61 Tahun
		Meningkatnya Kualitas Individu yang Berpengetahuan dan Berkarakter	Harapan Lama Sekolah	13,87 Tahun
Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Produktif				
2	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Ekonomi	PDRB Per kapita	73.31-73,67 (Juta)
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,19-5,60%
		Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,97%
Misi 3 : Menjadikan Cimahi sebagai Kota Teladan dalam Tata Kelola Pemerintahan				

3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	86,29
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi General	76,32

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondusifitas Kota yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan

4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondusifitas Kota	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondusifitas Kota	Indeks Perkotaan Berkelanjutan	70
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,35
		Meningkatnya Stabilitas Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	50,01

Misi 5 : Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kolaborasi Antar Generasi

5	Meningkatnya Kesejahteraan yang Merata	Meningkatnya Kesejahteraan yang Masyarakat	Indeks Gini	0,379-0,386
		Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	57,07
			Tingkat Kemiskinan	3,87-4,28%

Dari tabel di atas, dapat dilihat pada perjanjian Kinerja berdasarkan RKPD Perubahan Tahun 2025 jumlah sasaran strategis terdiri dari 7 (tujuh) sasaran dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama Kota. Sedangkan pada RPJMD 2025-2029 Indikator Kinerja Utama (IKU) Cimahi Tahun 2025 terdiri dari 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) Indikator kinerja utama (IKU). Berdasarkan RPJMD 2025-2029 terdapat 7 (tujuh) Indikator baru yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Usia Harapan Hidup
3. Harapan Lama Sekolah
4. PDRB Per kapita
5. Nilai Reformasi Birokrasi General
6. Indeks penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
7. Indeks Kesejahteraan Sosial

Indikator kinerja utama (IKU) yang tidak ada/ tidak berlanjut pada RPJMD 2025-2029 yaitu:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat
3. Opini BPK
4. Indeks Resiko Bencana

3 (tiga) IKU mengalami penyesuaian indikator yaitu:

1. Indeks Kesehatan diganti dengan Usia Harapan Hidup
2. Indeks *Liveable City* Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur diganti dengan Indeks Perkotaan Berkelanjutan
3. Indeks Pengetahuan diganti dengan Harapan Lama Sekolah

Dokumen Perjanjian Kinerja berdasar RKPD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Cimahi Tahun 2025 berdasar RPJMD 2025-2029 dapat diakses melalui tautan berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/16Q_u6Rhrs97hcJ8LIO7UJmNQOmpph9?usp=sharing

Tabel 2.3.3.

Sandingan IKU Kota Cimahi Berdasarkan RKPD Perubahan Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029

RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025						RPJMD 2025-2029				
NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N KINERJA	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISA SI	CAPAIA N KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MISI 1: Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul						MISI I: Mewujudkan Kota Cimahi yang Maju dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Agamis dan Berkarakter				
1	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Kesehatan	84,31	86,15	102,18%	Meningkatnya Daya Saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia	80,37	80,85	100,6%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,35	76,26	99%	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,61 Tahun	76	100,52%
		Indeks Pengetahuan	76,5	77	100,65%	Meningkatnya Kualitas Individu yang	Harapan Lama Sekolah	13,87 Tahun	13,86	100%

RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025						RPJMD 2025-2029				
NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N KINERJA	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISA SI	CAPAIA N KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Berpengetahuan dan Berkarakter				
2	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	100%	100%	100%					
MISI 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						MISI 3: Menjadikan Cimahi sebagai Kota Teladan dalam Tata Kelola Pemerintahan				
3	Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	81,26 (A-)	89,64	110,31%	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	86,29	89,64	103,88%
		Opini BPK	WTP	WTP	100%	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi General	76,32	79,79	104,54%

RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025						RPJMD 2025-2029				
NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N KINERJA	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISA SI	CAPAIA N KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MISI 3: Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah						MISI 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Produktif				
4	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Indeks Gini	0,379-0,386	0,365	103,69%	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Ekonomi	PDRB Per kapita	73.31-73.67(Juta)	76,99(juta)	105%
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,19 - 5,60%	5,33%	101,33%	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,19-5,60%	5,33%	101,33%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,05-9,86%	8,75	102,51%	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,97	8,75	102,51%

RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025						RPJMD 2025-2029				
NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N KINERJA	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISA SI	CAPAIA N KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MISI 4: Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan						MISI 5: Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kolaborasi Antar Generasi				
5	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	3,87-4,28%	4,20	101,90%	Meningkatnya Kesejahteraan yang Merata	Indeks Gini	0,379-0,386	0,365	103,69%
						Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	57,07	55,29	96,88%
							Tingkat Kemiskinan	3,87-4,28%	4,20	101,90%
MISI 5: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan						MISI 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondusifitas Kota yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan				
6	Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan	Indeks <i>Liveable City</i> Aspek Tata Ruang, Lingkungan	Sedang (70)	Sedang (70)	100%	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondusifitas Kota	Indeks Perkotaan Berkelanjutan	70	70	100%

RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025						RPJMD 2025-2029				
NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N KINERJA	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISA SI	CAPAIA N KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Hidup dan Infrastruktur								
7	Meningkatkan Ketahanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	72,63 (kelas resiko sedang)	57,61	145,13%	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,35	58,39	115,97%
						Meningkatnya Stabilitas Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	50,01	50,01	100%

BAB IV

PENUTUP

4. 1. Kesimpulan Umum

Pada tahun anggaran 2025 yang merupakan masa transisi perencanaan, penyusunan LKIP Kota Cimahi tahun 2025 mengacu pada IKU yang terdapat pada dokumen RKPD Perubahan dan Dokumen RPJMD 2025-2029. Pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Cimahi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi, serta penyerapan anggaran pada Perjanjian Kinerja Kota Cimahi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Jumlah total IKU yang terdapat pada dokumen RKPD Perubahan Kota Cimahi tahun 2025 adalah 12 (dua belas) IKU, dengan capaian IKU yang mencapai 100% sebanyak 3 (tiga) IKU yaitu Tingkat partisipasi masyarakat, Opini BPK, Indeks *Liveable City* aspek tata ruang, lingkungan hidup dan infastruktur. Sedangkan IKU yang capaiannya melampaui target 100% terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu Indeks Kesehatan 102,18%, Indeks pengetahuan 100,65%, Indeks Risiko Bencana 145,13. Sedangkan 1 (satu) IKU yang capaiannya tidak mencapai 100% yaitu Indeks Pemberdayaan Gender dengan capaian 99%. Pada dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025 terdapat 5 (lima) IKU yang dilanjutkan pada dokumen RPJMD baru yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Gini, LPE, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan
- IKU pada dokumen RPJMD 2025-2029 terdapat 14 (empat belas) IKU dengan capaian sebagai berikut:
- Dari 14 (empat belas) IKU, terdapat 5 (IKU) yang merupakan IKU lanjutan dari dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian 103,88%, Indeks Gini 103,69%, LPE 101,33%, Tingkat Pengangguran Terbuka 102,51%, Tingkat Kemiskinan 101,90%
- Hasil rekapitulasi capaian IKU sebagai berikut terdapat 10 (sepuluh) IKU yang mencapai lebih dari 100% yaitu Indeks Pembangunan

Manusia 100,6%, Usia Harapan Hidup 100,52%, Indeks Reformasi Birokrasi 103,88%, Nilai Reformasi Birokrasi General 111,37%, PDRB Per-kapita 105%, LPE 101,33%, TPT 102,51%, Indeks Gini 103,69%, Tingkat Kemiskinan 101,90%.

- Terdapat 3 (tiga) IKU yang mencapai 100% yaitu Indeks Perkotaan Berkelanjutan, Harapan Lama Sekolah, Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- Terdapat 1 (satu) IKU yang capaiannya kurang dari 100% yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial 96,88%.
- Anggaran belanja langsung yang dianggarkan pada APBD Kota Cimahi tahun anggaran 2025 sebesar **Rp.1.762.365.524.440,94,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.1.662.426.274.003,-** dengan capaian kinerja **94,33%**, dengan efisiensi anggaran sebesar **Rp. 99.939.250.437,94,-** atau sebesar **5,67%**.

4. 2. Evaluasi Dan Perbaikan

Langkah yang telah dilakukan untuk evaluasi dan perbaikan capaian kinerja IKU Kota yaitu:

1. Penyempurnaan dokumen telah dilaksanakan melalui penyelarasan Renstra PD terhadap RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Untuk rumusan sasaran strategis PD yang belum selaras berdasarkan review RPJMD, sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian pada tahapan sebelum penetapan Perwal Renstra PD;
2. Penyempurnaan RKPD dan Renja PD pada tahun 2025 sudah dilakukan pada kesempatan Perubahan Perencanaan, yaitu RKPD Perubahan dan Renja Perubahan 2025. Hal ini juga didorong dengan telah ditetapkannya RPJMD Kota Cimahi 2025-2029;
3. Indikator kinerja utama PD mengacu/ berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-

2029. Penyempurnaan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2025;
4. Penjenjangan kinerja hingga level individu dan *cross cutting* dapat dilakukan pada penyusunan Renja PD berikutnya (dengan berpedoman pada Renstra PD);
 5. Melakukan perbaikan perumusan *cascading* untuk tahun perencanaan 2027 untuk dokumen RKPD dan juga untuk dokumen Renja PD melalui pelaksanaan desk/asistensi perumusan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja berdasarkan RPJMD Kota Cimahi 2025- 2029 dan Renstra PD 2025-2029;
 6. Perangkat Daerah telah diperintahkan untuk melengkapi matriks IKU dengan formulasi, definisi operasional dan sumber data. Hal ini juga menjadi salah satu catatan penting yang dibahas dalam kesempatan desk LKE AKIP PD;
 7. Membuat aplikasi capaian kinerja yang terintegrasi dengan aplikasi presensi pegawai dan dilengkapi dengan penilaian 360;
 8. Untuk meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, serta memastikan bahwa Laporan Kinerja dimanfaatkan secara efektif sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan dalam perencanaan kinerja pada periode berikutnya, Kota Cimahi telah melaksanakan Desk Desk SAKIP PD area Pelaporan Kinerja pada tanggal 7 sd 8 April 2026;
 9. Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP, Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: Peningkatan kapasitas melalui sosialisasi pelaksanaan dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah untuk 29 Perangkat daerah, telah dilakukan upaya peningkatan dengan dilengkapi Kebijakan berupa SOP Evaluasi AKIP, Pertemuan Koordinasi Tim Evaluator Kota dalam pemenuhan bukti eviden beserta catatan dan rekomendasi tim, telah dilaksanakan Pleno Evaluasi AKIP Perangkat daerah terhadap hasil evaluasi 29 Perangkat daerah, Merevisi Keputusan Inspektur Nomor 37/PR.09.06/KEP-Inspektorat/2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah di Kota Cimahi

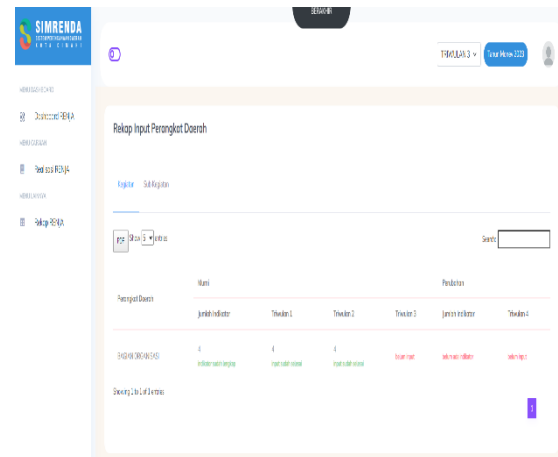
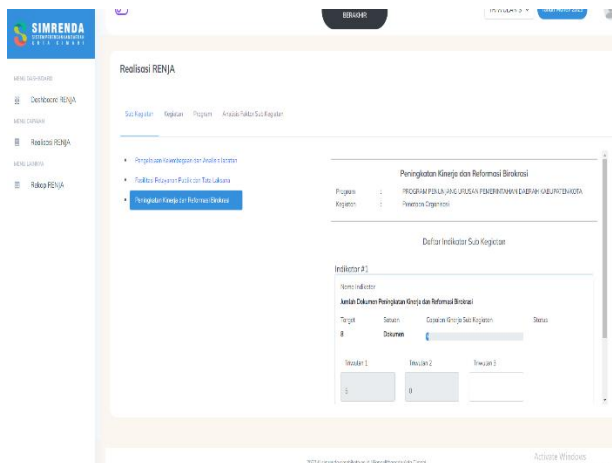
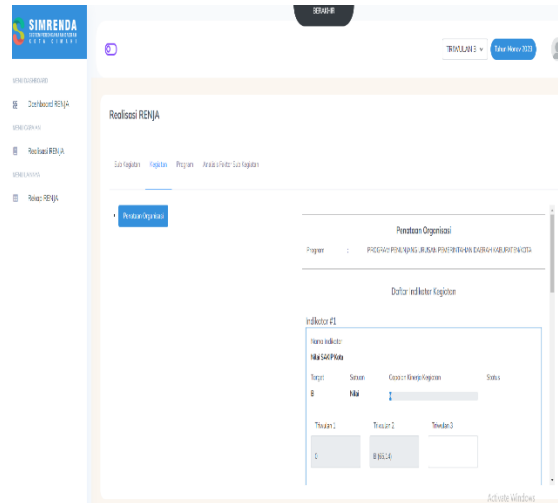
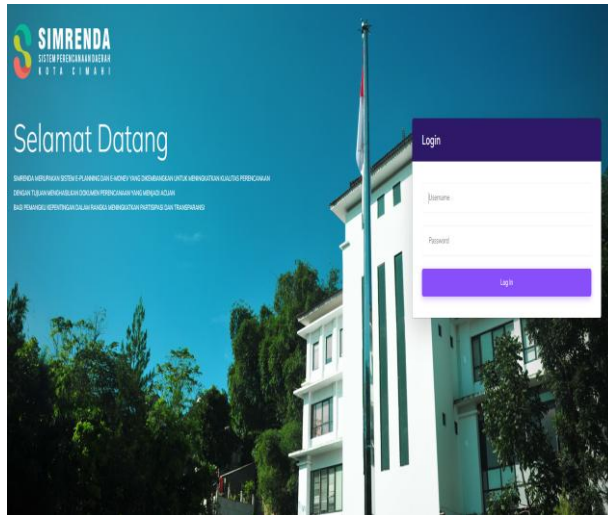
serta menambahkan substansi tentang standar temuan dan rekomendasi;

10. Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal, Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) bagi evaluator, Mentoring *System*/Sistem Pendampingan Evaluator di Perangkat Daerah, Telah dilaksanakan koordinasi, penyusunan bukti dan analisa tim Evaluator Kota berdasarkan rekomendasi Kemenpan-RB.
11. Untuk link *evident* dokumen dan pelaksanaan kegiatan dapat diunduh pada tautan berikut: <https://bit.ly/MatriksRATLSAKIPKota>

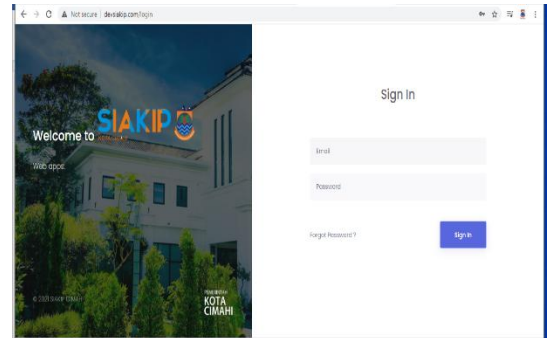
LAMPIRAN-LAMPIRAN

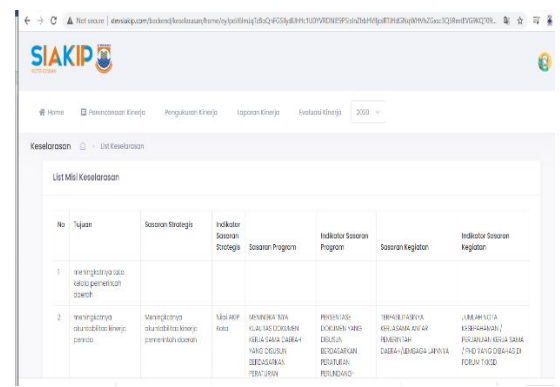
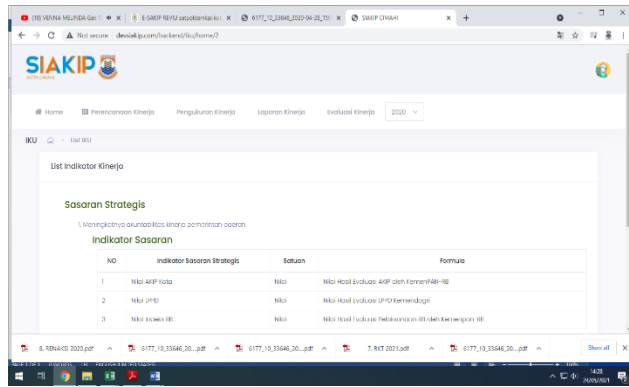
APLIKASI PERENCANAAN DAN MONEV KOTA CIMAHI

- ✓ BAPPELITBANGDA Kota Cimahi memiliki aplikasi simrenda merupakan sistem e-planning dan e-monev yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan <https://simrenda.cimahikota.go.id>

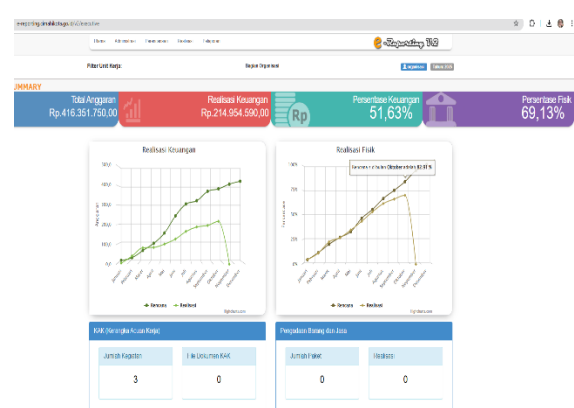


- ✓ Bagian Organisasi memiliki aplikasi siakip merupakan sistem akuntabilitas kinerja yang dikembangkan untuk menetapkan strategi dalam mempercepat capaian kinerja organisasi dan individu <https://siakip.cimahikota.go.id/login>





- ✓ Bagian Administrasi Pembangunan Kota Cimahi memiliki aplikasi e-reporting merupakan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian realisasi keuangan dan kinerja keuangan terintegrasi dengan database sipkd, simrenda dan database kepegawaian dan web service Ipse <https://e-reporting.cimahikota.go.id>



No	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi %	Realisasi %	Realisasi %	Realisasi %	Realisasi %	Realisasi %
1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000

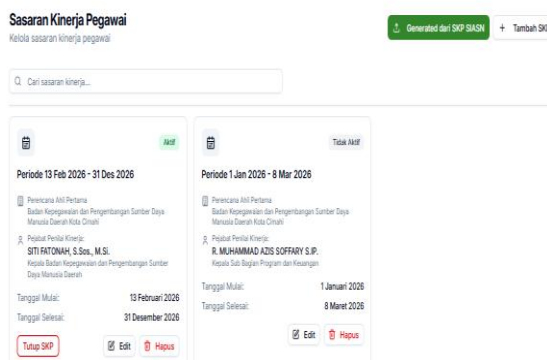
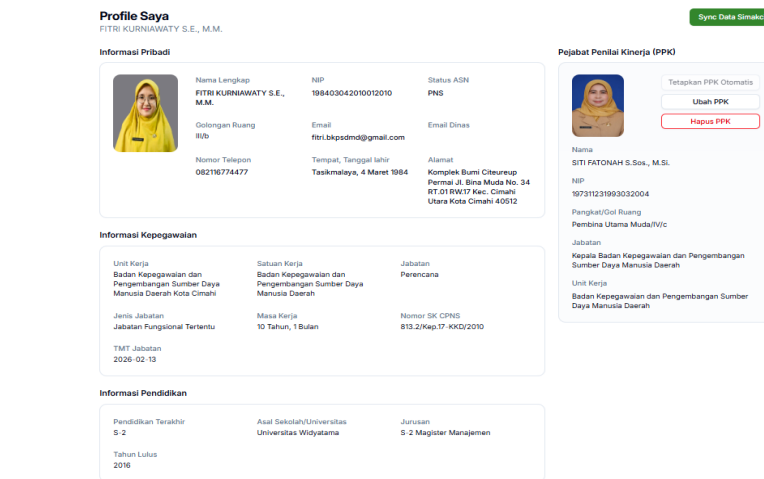
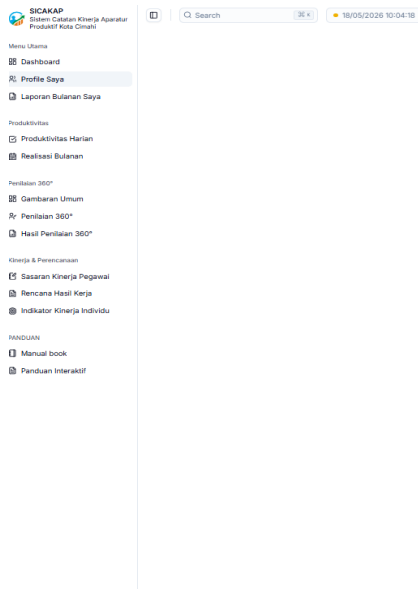
No	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi %	Realisasi %	Realisasi %	Realisasi %	Realisasi %	Realisasi %
1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000

BKPSDMD Kota Cimahi memiliki SICAKAP (Sistem Catatan Kinerja Aparatur Produktif) adalah platform digital yang dikembangkan oleh BKPSDMD Kota Cimahi untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan proses pelaporan serta evaluasi kinerja harian aparatur dalam satu sistem yang mudah diakses. Inti dari aplikasi SICAKAP kini telah terintegrasi penuh dengan aplikasi AKUPINTER, khususnya dalam penyelarasan data presensi pegawai untuk

memastikan kesesuaian antara kehadiran fisik dan produktivitas kerja. Aplikasi ini mencakup berbagai fitur penting, antara lain:

- Pengisian Logbook Aktivitas Harian;
- Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- Penilaian Perilaku 360; serta
- Integrasi otomatis data presensi dari AKUPINTER.

Dengan adanya fitur Penilaian Perilaku 360, evaluasi kinerja tidak hanya dilakukan oleh atasan, tetapi juga melibatkan rekan sejawat dan bawahan untuk menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan komprehensif. Dengan mengintegrasikan semua fitur ini, SICAKAP membantu BKPSDMD Kota Cimahi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kinerja, serta memberikan kepastian data yang akurat bagi pegawai dan pihak terkait.



✓ informasi perencanaan kinerja pemerintah kota cimahi dan perangkat daerah dapat di akses oleh publik/masyarakat luas melalui [website cimahikota.go.id](http://website.cimahikota.go.id)

PENGHARGAAN KOTA CIMAHI TAHUN 2025



Kota Cimahi berhasil meraih **Penghargaan Kota Layak Anak dengan Predikat Kategori Pertama** dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan Kota Layak Anak diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah kota Cimahi dalam menjamin hak anak dan perlindungan khusus anak secara berkelanjutan.



Kota Cimahi memperoleh Juara Ketiga pada ajang **Mandaya Award** yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Cimahi dalam program pemberdayaan Masyarakat, peningkatan

kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan yang inovatif.



Trusted Achievement Award merupakan ajang penghargaan bergengsi yang ditujukan bagi institusi pemerintahan, swasta, lembaga pendidikan, hingga profesional yang mampu menghasilkan inovasi produk maupun layanan. Penilaiannya mencakup aspek kinerja, prestasi, dedikasi, kredibilitas,

inovasi, serta integritas dengan dampak positif terhadap pembangunan bangsa. Sejumlah inovasi menjadi dasar penilaian, di antaranya pengembangan layanan administrasi berbasis digital, penguatan ekosistem ekonomi kreatif bagi anak muda, serta upaya penanganan persoalan sosial seperti stunting melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan mitra komunitas. Pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta pemanfaatan potensi lokal dinilai berhasil meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan warga.

Cimahi memperoleh penghargaan sebagai **Kota Terinovatif dalam Penurunan Stunting**. Penghargaan ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Kota Cimahi dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di Kota Cimahi.





Anugerah Gapura Sri Baduga adalah ajang tahunan di Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi dan memberikan apresiasi kepada kinerja terbaik desa dan kelurahan berdasarkan berbagai aspek, seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, ketentraman, dan tata kelola pemerintahan. Ajang ini juga menilai pemenuhan pelayanan dasar, responsif terhadap masalah warga, dan partisipasi masyarakat. Kelurahan Cibeber Kota Cimahi berada di urutan kedua dari lima besar menegaskan

bahwa pemerintah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan kelurahan yang profesional dan responsif.

Kota Cimahi kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih predikat **“Kota Sangat Inovatif”** dalam ajang **Innovation Government Award (IGA) 2025** yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini diserahkan di Jakarta pada 10 Desember 2025, menandai peningkatan posisi Cimahi ke peringkat ke-12 secara nasional.





Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, meraih penghargaan bergengsi **detikJabar Awards 2025 kategori Figur Akselerator Kemajuan** pada 10 Desember 2025 di Bogor. Penghargaan ini diberikan atas kepemimpinan visioner dan kebijakan strategisnya, termasuk alokasi 30% APBD untuk infrastruktur guna mendorong kemajuan Kota Cimahi.



Kota Cimahi meraih penghargaan **P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera)** juara ketiga tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Program ini berfokus pada pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga.



Anugerah Wira Dharma Kota Cimahi tahun 2025 yang diserahkan di Sasana Budaya Ganesa, ITB, Bandung, pada 30 Desember 2025. Penghargaan ini menandai keberhasilan Pemkot dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, inovasi, dan pelayanan publik yang diakui tingkat provinsi